

REKONSTRUKSI FIKIH ZAKAT DARI IBADAH MENUJU
MUAMALAH DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Studi Islam



Oleh:
A. MUHYIDDIN KHOTIB
NIM. F18312022

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : A. Muhyiddin Khotib

NIM : F18312022

Program : Doktor (S-3)

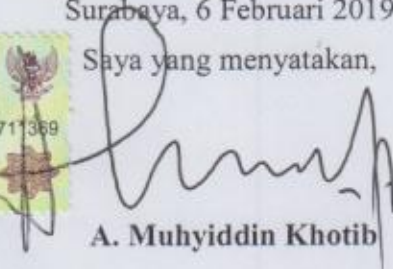
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Februari 2019



Saya yang menyatakan,


A. Muhyiddin Khotib

PERSETUJUAN

Disertasi ini telah disetujui
dan layak diujikan

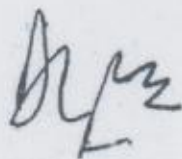
Oleh

PROMOTOR



Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA

PROMOTOR


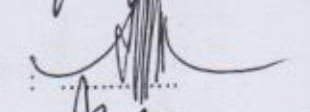
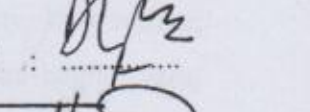

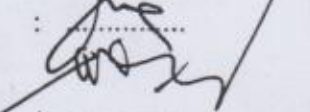
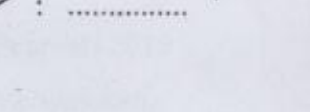
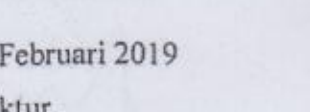


Prof. Dr. H. A. Yasid, MA, LLM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Disertasi a.n. A. Muhyiddin Khotib yang telah diujikan pada ujian tahap pertama (tertutup) pada hari/tanggal Kamis/14 Februari 2019 dinyatakan layak diajukan pada ujian tahap kedua (terbuka).


Tim Penguji:

- | | | |
|---|------------------|---|
| 1. Prof. DR. H. Aswadi, M.Ag | Ketua |  |
| 2. Dr. H. Hamis Syafaq, M.Fil.I | Sekretaris |  |
| 3. Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA | Promotor/Penguji |  |
| 4. Prof. Dr. H. A. Yasid, MA., LL.M | Promotor/Penguji |  |
| 5. Prof. Dr. H. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I | Penguji Utama |  |
| 6. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag | Penguji |  |
| 7. Dr. H. Abd. Salam Nawawi, M.Ag | Penguji |  |

Surabaya, 11 Februari 2019

Direktur,




Prof. DR. H. Aswadi, M.Ag

NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : A. Muhyiddin Khotib
NIM : F18312022
Fakultas/Jurusan : Studi Islam
E-mail address : muhyiddin.mu@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**REKONSTRUKSI FIKIH ZAKAT DARI IBADAH MENUJU MUAMALAH
DALAM PERSPEKTIF MAQAŞID AL-SHARI‘AH**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Desember 2019

Penulis

(A. Muhyiddin Khotib)

ritual di satu sisi dan ibadah sosial di sisi lain. Ketegasan ini dirasa amat penting manakala akan melakukan kajian tentang fikih zakat sehingga kajiannya menjadi lebih dinamis dan akomodatif. Paradigma yang digunakan dalam fikih zakat bukan paradigma ibadah, akan tetapi menggunakan paradigma muamalah. Penelitian ini digagas dalam rangka mengkajinya secara lebih mendalam untuk mengantarkan fikih zakat agar dapat diposisikan pada posisi muamalah tanpa harus menghilangkan dimensi ubudiahnya. Di sisi lain, peneliti sadar kalau usaha ini akan menabrak fikih zakat yang sudah dianggap final terutama dalam terminologi *kutub al-turāth*.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Setelah mencermati beberapa masalah yang tertuang dalam latar belakang di atas, dalam penelitian ini teridentifikasi beberapa permasalahan terkait sebagaimana berikut:

- a. Selama ini zakat dipahami dan diposisikan pada ibadah, padahal sebenarnya lebih banyak memiliki arti sosial, bahkan menjadi pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Penulisan zakat dalam kerangka ibadah yang dipahami selama ini tak lebih disebabkan zakat selalu disandingkan dengan salat dalam beberapa ayat Al-Qur'an.
- b. Ada empat faktor utama yang mendorong zakat sebagai domain muamalah, yaitu: *pertama*, faktor yuridis, yakni menyangkut keterlibatan negara dan zakat sebagai salah satu sumber pendapatan keuangan negara; *kedua*, faktor historis; *ketiga*, faktor filosofis yang


di samping pajak dalam rangka menyukseskan dan meningkatkan pembangunan nasional. Namun, yang menjadi permasalahan adalah kemungkinan zakat didayagunakan dalam rangka menyukseskan dan meningkatkan pembangunan nasional dengan dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia sebagaimana sistem perpajakan yang berlaku di atas landasan undang-undang dalam kerangka tubuh hukum nasional. Karena itu, untuk memperoleh jawaban dari pandangan hukum Islam, kerja penelitian ini diarahkan kepada studi komparatif antara sistem pengelolaan pajak di Indonesia dan sistem pengelolaan zakat menurut konsepsi fikih, sebagai objek penelitian dengan langkah-langkah penelitian pemikiran hukum yang bersifat kualitatif berdasarkan sumber-sumber data tertulis melalui analisis deskriptif-komparatif dan historis-argumentatif.

- b. Zakat dan pajak mempunyai segi-segi persamaan, seperti asas pemungutan, pengelolaan, dan sebagian pendaayagunaannya; dan mempunyai segi-segi perbedaan, semisal status dan sumber-sumber hukum, identitas keibadahan, kelestarian hukum wajib, tujuan hukum, dan sekaligus pendaayagunaannya. Zakat harus dikelola oleh pemerintah yang islami. Sedangkan pemerintah republik Indonesia adalah pemerintah yang islami karena menganut kedaulatan rakyat dan mengandung prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang prinsip-prinsip hukumnya tidak bertentangan, bahkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini berarti pemerintah negara Republik Indonesia

lembaga dan perseorangan untuk melakukan pengelolaan zakat, belum memenuhi ketiga unsur untuk dapat dinyatakan adil, sebagaimana dikemukakan berikut ini:

- 1) Kelayakan. Jika dibandingkan dengan BAZNAS, maka LAZ tidak mendapatkan perlakuan yang sewajarnya atau selayaknya untuk melakukan pengelolaan zakat. Kata “membantu” menunjukkan ketidaksetaraan posisi di antara BAZNAS dan LAZ. Pasal 17 telah menyubordinasikan kedudukan LAZ sebagai lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk masyarakat di bawah BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. Eksistensi LAZ hanya sekadar membantu BAZNAS dalam melakukan pengelolaan zakat. Subordinasi LAZ juga disertai kewajiban LAZ terhadap BAZNAS yang harus ditunaikan, yaitu melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit secara berkala.
- 2) Kebebasan. LAZ tidak mendapatkan kebebasan untuk melakukan pengelolaan zakat. Persyaratan pembentukan LAZ berupa rekomendasi dari BAZNAS membuka peluang terjadinya konflik kepentingan. Hal ini dikarenakan BAZNAS juga menyandang status sebagai operator zakat nasional, status yang sama sebagaimana halnya LAZ. BAZNAS mempunyai motif dan kewenangan untuk menghalangi pendirian LAZ yang berpotensi menjadi pesaingnya. Hal ini turut menegaskan terjadinya

pergeseran posisi LAZ menjadi subordinat BAZNAS sebab pendirian LAZ disyaratkan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BAZNAS di wilayah yang belum memiliki BAZNAS dan LAZ; dan adanya restriksi dan persyaratan yang diterapkan pada salah satu pengelola zakat, sementara pengelola zakat lainnya tidak dibebani kewajiban untuk memenuhi persyaratan yang sama, telah menyebabkan adanya mekanisme yang tidak adil, sehingga hasilnya tentu juga tidak adil. Berkaitan dengan kebebasan, amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang dalam masyarakat hanya bebas melakukan pengelolaan zakat.

- 
- 3) Persamaan kedudukan. LAZ tidak mendapatkan kedudukan dan akses yang sama untuk melakukan pengelolaan zakat. UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberi *privilege* secara luar biasa kepada BAZNAS, sehingga menciptakan *level of playing field* yang tidak sama antara BAZNAS dan LAZ. Ketika LAZ dihadapkan pada disiplin kinerja yang tinggi karena kelangsungan operasionalnya sepenuhnya tergantung pada zakat yang dihimpun, BAZNAS mendapat pembiayaan dari APBN dan APBD serta tetap berhak menggunakan zakat untuk operasionalnya, yaitu hak amil zakat. Kedudukan dan akses yang sama untuk melakukan pengelolaan zakat juga belum dimiliki oleh amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang dalam masyarakat, karena hanya dapat beroperasi di wilayah yang belum

terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ. Jika dalam prosedur, pihak-pihak tertentu diberi kedudukan dan akses yang lebih dibandingkan dengan yang lain, maka prosedur tersebut harus dinyatakan tidak adil dan secara otomatis hasilnya juga tidak adil.

- b. Konsep pengelolaan zakat berdasarkan asas keadilan dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemerataan pendistribusian zakat sudah memenuhi dua kriteria untuk dapat dikatakan adil, yaitu ketepatan sasaran, artinya pendistribusian zakat ditujukan kepada perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik; dan ketercapaian tujuan pendistribusian zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

Setelah membaca kesimpulan tersebut ternyata sifat dan objek penelitiannya sangat berbeda dengan apa yang akan dibahas oleh peneliti, di mana penelitian Nur Fadhilah bersifat lapangan. Keadilan yang dibahas oleh Nur Fadhilah bukan keadilan yang akan dijadikan bagian dari kerangka teori peneliti, keadilan yang dimaksud Nur Fadhilah menyangkut keadilan dalam pelaksanaan penyelenggaraan zakat antara BAZNAS dan LAZ perspektif undang-undang zakat. Objek penelitiannya berangkat dari peraturan perundang-undangan. Sementara peneliti akan melakukan penelitian pustaka dan objeknya tentang telaah kritis terhadap konstruksi penulisan dan pembahasan fikih zakat sebagai domain muamalah. Konten penelitiannya sama sekali tidak menyentuh hal yang berkenaan dengan apa

terdapat dalam UUD 1945. Bagi negara sekuler, keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat dibagi dalam dua kategori, yaitu negara tidak terlibat dalam pengelolaan zakat dan negara yang memfasilitasi pengelolaan zakat (Powell, 2010). Di negara sekuler, zakat lazimnya diletakkan sebagai sesuatu yang bersifat *voluntary*. Dari dua kategori tersebut, Indonesia sulit diletakkan pada salah satu dari dua itu. Kesulitan itu didasarkan pada dua hal, Indonesia mengklaim dirinya bukan negara agama dan sekaligus bukan negara sekuler, meskipun dalam praktiknya Indonesia adalah negara sekuler, tetapi Indonesia adalah negara Pancasila.

- b. Sesuai dengan kategori di atas, Indonesia berada dalam posisi dilematis. Hal ini karena pemerintah Indonesia bukan hanya memfasilitasi pengelolaan zakat, akan tetapi pemerintah justru melibatkan diri dalam pengelolaan tersebut. Kalau menggunakan pembagian yang dilakukan oleh Kuru (2007) tentang sekulerisme pasif dan sekulerisme asertif, Indonesia jelas bukan termasuk pada tipe yang pertama. Akan tetapi, untuk sekulerisme asertif yang pengertian umumnya bertujuan mengeliminasi agama dari ruang publik, Indonesia justru memiliki makna yang sebaliknya, yakni mengisi ruang publik dengan agama, karena hal itu dijamin oleh konstitusi. Dengan posisi demikian, Indonesia harus konsisten dengan konstitusi yang dimilikinya berkaitan dengan pembuatan kebijakan keagamaan karena ia berada di antara dua kutub itu. Hal ini dimaksudkan untuk

memberikan pembedaan antara negara Islam, sekuler dan Pancasila. Di sisi lain, jika ditinjau dari perspektif interpretatif, klaim bahwa pengelolaan zakat merupakan kewenangan pemerintah adalah lemah. Dari berbagai pemahaman, bukan hanya pemerintah saja yang memiliki otoritas pengelolaan zakat itu, tetapi pemegang otoritas keagamaan (dalam hal ini ulama atau organisasi keagamaan) dan kelompok masyarakat sipil juga memiliki kewenangan yang sama dan memiliki posisi sejajar dengan pemerintah. Selain itu, pemerintah berargumen bahwa keterlibatannya dalam pengelolaan zakat dimaksudkan untuk memfasilitasi masyarakat, khususnya masyarakat muslim, dalam menjalankan kewajiban zakatnya agar pengelolaan zakat itu menjadi efektif dan efisien. Bentuk fasilitas yang diberikan semestinya cukup berupa regulasi dan pengawasan, tidak diperlukan fasilitas yang berupa keterlibatan dalam operasionalisasi pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik memang akan mengantarkan pada tercapainya tujuan zakat, yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang membawa kemaslahatan bersama, tetapi keterlibatan pemerintah yang dominatif justru dapat menjadi faktor penghambat tercapainya tujuan itu.

- c. Pengelolaan zakat yang didasarkan pada prinsip *good governance*, sebagaimana tertuang dalam pasal 2 UUPZ (Undang Undang Pengelolaan Zakat), dapat dibenarkan sepanjang prinsip itu tidak mengarahkan pada bentuk sentralisasi pengelolaan zakat, tetapi lebih

menekankan adanya bangunan kerjasama dengan masyarakat sipil dengan prinsip kesetaraan. Demikian juga dari perspektif *maṣlahah*, keterlibatan pemerintah itu dapat dibenarkan sepanjang keterlibatan itu diletakkan pada posisi dan peran yang tepat. Meminjam terminologi fikih, keterlibatan pemerintah yang tepat diletakkan dalam posisi sunah, yaitu keterlibatan yang dianjurkan untuk kebaikan dan kesempurnaan pengelolaan zakat itu, bukan keterlibatan yang dominatif yang meletakkan masyarakat dalam posisi subordinat terhadap pemerintah.

- d. Dominasi pemerintah dalam pengelolaan zakat dianggap oleh masyarakat sipil sebagai bentuk keterlibatan yang berlebihan. Dominasi itu terjadi sejak dalam proses formulasi kebijakannya. Dalam proses formulasi tersebut, pemerintah telah menunjukkan dominasinya karena disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena sistem pemerintahan yang dipilih oleh Indonesia. Sistem pemerintahan presidensial memungkinkan posisi eksekutif memiliki posisi yang sangat kuat, sehingga penguasaan dan akses ke berbagai aspek yang diperlukan bagi suatu rancang kebijakan cukup tersedia dengan baik. Kedua, budaya politik Indonesia yang cenderung hierarkis meletakkan masyarakat teralienasi dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam budaya hierarkis itu, masyarakat diposisikan sebagai objek kebijakan, sedangkan pemerintah dan DPR sebagai subjeknya. Dalam posisi seperti itu, sulit bagi masyarakat untuk mendesak kepentingannya

karena dianggap sudah terwakili oleh DPR.

Apa yang ditulis oleh Abdul Ghoffar berfokus pada dominasi pemerintah terhadap pengelolaan zakat, peneliti mengkritisi ketidakberimbangan pengelolaan zakat antara yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat, juga dilihat dari sudut pandang keadilan dalam pengelolaan dan pendistribusiannya. Abdul Ghoffar masih melihat bahwa zakat seharusnya tidak dikelola pemerintah karena Indonesia bukan negara Islam. Pandangan ini dimungkinkan berbeda dengan apa yang akan peneliti tulis dalam disertasi ini.

Dengan demikian, materi pembahasan yang akan peneliti lakukan, baik konten maupun objeknya, sangat berbeda. Kritik yang disampaikan Abdul Ghoffar terjadi akibat tidak adanya ketegasan mengenai posisi fikih zakat, apakah termasuk domain muamalah dan fikih zakat dapat dipisahkan dari sejarahnya. Di sisi lain, umat Islam Indonesia mengakui terhadap sahnya pemerintahan yang ada, baik secara *de jure* maupun *de facto*. Pengakuan ini seharusnya dikaitkan dengan kewenangan pemerintah dalam mengelola harta zakat. Partisipasi masyarakat dan ormas sangat tergantung pada undang-undang zakat dan kebijakan pemerintah sendiri.

Melalui penelitian ini peneliti akan mengurai tentang akibat memposisikan fikih zakat sebagai domain muamalah sangat besar pengaruhnya terhadap sumber keuangan negara dan pemerintah sebagai pengelolanya sekaligus yang menetapkan sanksi hukumnya manakala terjadi suatu pelanggaran.

membendungnya. Sebaliknya, justru persoalannya berkembang ke arah reproduksi konflik. Dalam rangka menganalisis persoalan pertarungan perebutan posisi tersebut, peneliti menggunakan perspektif teoritiknya Vilfredo Pareto (sebagai teori utama) tentang sirkulasi elite. Mengacu pada pandangan Pareto bahwa konflik Perda Zakat tersebut bersifat a-historis dan mekanis (sosio-psikologi). Lalu, untuk melengkapinya (sebagai *back up* teori) digunakan perspektif teoritik yang dikembangkan oleh Pierre Bourdeu tentang perebutan kekuasaan antar elite. Mengacu pada pandangan Pierre Bourdeu bahwa dalam pertarungan perebutan posisi pimpinan NW berlangsung melalui proses dominasi antar aktor konflik. Mereka saling mempertaruhkan modal melalui proses historis, tetapi tidak secara proses mekanis (sosio-kultural).

- c. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perebutan posisi kekuasaan antar elite NW di arena konflik Perda Zakat Profesi No. 9 Tahun 2002, bukan bertumpu pada persoalan teologis. Akan tetapi, bertumpu pada persoalan politis yang dikendalikan oleh kekuatan sosial politik kelompok elite NW. Kelompok elite NW tersebut mempertaruhkan modal melalui praktik dominasi massa dan rekonstruksi relasi kuasa dengan pemerintah. Dalam perebutan posisi tersebut, kelompok Rauhun (R1) dapat menguasai modal dan penempatan strategi modal lebih dominan dari kelompok Raihanun (R2), sehingga dapat mengendalikan persoalan konflik Perda Zakat tersebut. Sedangkan

minallāh dan *ḥabl min al-nās*. Ketentuan zakat yang semula berada dalam ranah syariat dan fikih, dalam perkembangannya di Indonesia kemudian diangkat dalam hukum positif, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Pengelolaan Zakat. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji: *pertama*, prinsip-prinsip dalam peraturan zakat di Indonesia; *kedua*, kepatuhan terhadap peraturan zakat dalam pengelolaan dan pembayaran zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta; dan *ketiga*, upaya meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan zakat yang dimaksud.

- b. Penelitian ini merupakan kombinasi dari penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara studi dokumen terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber dan responden. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif.
- c. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, prinsip-prinsip dalam peraturan zakat di Indonesia adalah prinsip kemaslahatan dan prinsip keadilan; *kedua*, ketentuan dalam peraturan zakat sudah dipatuhi oleh badan atau lembaga pengelola zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pengelolaan zakat, namun ketentuan dalam peraturan zakat

belum sepenuhnya dipatuhi umat Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi responden penelitian ini dalam membayarkan zakatnya; *ketiga*, untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan zakat di masa yang akan datang maka perlu dilakukan upaya-upaya, antara lain: (1) menyempurnakan substansi peraturan zakat yang ada saat ini dengan memasukkan ketentuan sanksi negatif bagi wajib zakat yang mengabaikan kewajibannya dan sanksi positif yang lebih menarik bagi wajib zakat yang telah membayarkan zakatnya melalui badan atau lembaga pengelolaan zakat yang resmi diakui pemerintah, dan (2) melakukan edukasi zakat dan sosialisasi peraturan zakat kepada umat Islam secara terprogram.

Hasil penelitan Zulkarnain Harahab secara substansi tidak terkait dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti. Zulkarnain fokus pada penelitian tentang tingkat kepatuhan terhadap Undang Undang Pengelolaan Zakat. Dalam konteks di mana zakat dikelola oleh pemerintah melalui Undang Undang Zakat terdapat benang merah yang menghubungkan antara apa yang akan peneliti teliti, yakni fikih zakat sebagai domain muamalah dan di Indonesia telah dikokohkan dengan keluarnya Undang Undang Zakat, hal ini semakin mempertegas bahwa dalam zakat ada aspek muamalah yang sangat kuat. Akan tetapi, Zulkarnain belum menyentuh pada persoalan apakah zakat diposisikan sebagai domain muamalah atau tidak. Temuannya tentang prinsip perundang-undangan tentang zakat berupa prinsip keadilan dan

38, 39; QS. al-Mudaththir [74] ayat 42; QS. al-Taubah [9] ayat 5, 11, 18, 60, 71, 99, 103-104; QS. Al-Baqarah [2] ayat 2-3, 43, 83, 110, 177, 195, 215, 245, 254, 261-274, 277; QS. Āli ‘Imrān [3] ayat 92, 133-134, QS. al-Nisā’ [4] ayat 77, 126; QS. al-Mā’idah [5] ayat 55, 156; QS. al-Anfāl [8] 2-4, 60; QS. al-Kahfi [18] ayat 81, QS. Maryam [19] ayat 13, 31, 55; QS. al-Anbiyā’ [21] ayat 73; QS. al-Hajj [22] ayat 71, 78; QS. al-Mu’minūn [23] ayat 4; QS. al-Nūr [24] ayat 37, 56; QS. al-Naml [27] ayat 3; QS. Luqmān [31] ayat 4; QS. al-Aḥzāb [33] ayat 33, 35; QS. al-Mujādalah [58] ayat 13; QS. al-Muzzammil [73] ayat 20; QS. al-Bayyinah [98] ayat 5; QS. al-Ra’d [13] ayat 22-24; QS. Ibrāhīm [14] ayat 31; QS. al-Furqān [25] ayat 67; QS. Al-Sajdah [32] ayat 15; QS. al-Saba’ [34] ayat 39; QS. Fāṭir [35] ayat 29-30; QS. Muḥammad [47] ayat 38, QS. al-Ḥadīd [57] ayat 7, 18; QS. al-Muṇafiqūn [63] ayat 9-11; dan QS. al-Taghābun [64] ayat 15-17.

- b) Teks-teks Hadis yang berbicara tentang zakat, di antaranya kitab *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*, kitab *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, kitab *Musnad Ibnu Khuzaimah*, dan beberapa *al-kutub al-sunan* yang terdiri atas kitab *Sunan al-Turmudhī*, kitab *Sunan Ibnu Mājah*, kitab *Sunan al-Nasā’ī*, kitab *Sunan Abī Dawud*, kitab *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ al-Suyūṭī*, dan kitab *Mukhtaṣar al-Bukhārī*.

antara ibadah dan muamalah, rekonstruksi fikih zakat dari ibadah menuju muamalah, proses rekonstruksi tersebut, dan penguatan fikih zakat sebagai domain muamalah; dan (3) Implikasi rekonstruksi fikih zakat tersebut terhadap objek dan *miqdār* zakat, serta penerapan dalil dan *qā'idah tashrī'iyah*-nya.

Bab Keempat: *Urgensi Rekonstruksi Fikih Zakat dan Implikasinya*.

Bab ini memuat hasil analisis peneliti mengenai urgensi rekonstruksi fikih zakat dari ibadah menuju muamalah, proses rekonstruksi tersebut, lalu pemaparan tentang faktor-faktor pendukung dan penguat bangunan fikih zakat sebagai domain muamalah, juga implikasinya terhadap pengembangan objek dan *miqdār* zakat, serta penerapan dalil dan *qā'idah tashrī'iyah*-nya yang berupa kaidah-kaidah *uṣūliyyah* dan *fiqhiyyah*, dan di bagian akhir bab ini peneliti menjabarkan posisi fikih zakat dalam kerangka muamalah.

Bab Kelima: *Penutup*. Bab terakhir ini terdiri atas kesimpulan, implikasi teoritik, dan rekomendasi peneliti.



bagian, *'aqīdah* dan *sharī'ah*. *'Aqīdah* adalah pembahasan tentang ketuhanan, sedangkan *sharī'ah* adalah pembahasan tentang kemanusiaan. Bidang *sharī'ah* kemudian dibagi menjadi ibadah dan muamalah. Pembahasan ibadah adalah hubungan seorang muslim dengan Penciptanya, sedangkan muamalah merupakan kajian tentang hubungan satu orang dengan orang lain. Di antara kajian dalam bidang ibadah adalah zakat.

Dengan dimasukkannya zakat dalam pembahasan ibadah, maka zakat kemudian dianggap sebagai bidang yang jauh dari pemikiran (*ijtihādī*). Sebagai konsekuensinya tentu pembahasan zakat menjadi statis dan tidak menerima “diskusi” (*qābil li al-niqās*). Dengan demikian, zakat kemudian menjadi kehilangan sifat vitalnya untuk kemanusiaan, padahal zakat semestinya memberikan dampak besar bagi kemanusiaan. Sebagai ibadah yang bersifat *māliyyah ijtīmā'īyyah*, zakat seharusnya dapat mengangkat status seorang muslim dari fakir miskin menjadi orang yang berekonomi memadai, atau menurut konsep zakat, dari seorang mustahik menjadi muzaki. Oleh karena itu, maka sudah seyogianya zakat ditempatkan bukan hanya di bidang ibadah, akan tetapi dimasukkan ke dalam bidang muamalah. Yūsuf al-Qarḍāwī (lahir 1926 M) termasuk tokoh yang setuju, bahkan memberikan kesimpulannya bahwa pembahasan fikih zakat tidak harus diletakkan dalam pembahasan ibadah, namun dapat dibahas dalam bidang muamalah. Lebih lanjut, Syekh al-Qarḍāwī (lahir 1926 M) mengatakan bahwa zakat adalah sistem keuangan,

1) Model Tingkat Konsumsi

Pada model ini, pembahasan mengenai pengertian dan indikator diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok, dalam hal ini terutama beras. Model ini melihat konsumsi ekuivalen dengan beras per kapita.

2) Model Kesejahteraan Keluarga

Model ini memetakan keluarga berdasarkan kesejahteraan. Tahap pertama adalah prasejahtera (sangat miskin) yang diartikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan, dan kesehatan.

Tahap kedua adalah sejahtera tahap I (miskin) yang diartikan sebagai keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya.

Tahap ketiga adalah sejahtera II, di mana keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi: a) memiliki tabungan keluarga, b) makan bersama sambil berkomunikasi, c) mengikuti kegiatan masyarakat, d) rekreasi bersama (6 bulan sekali), e) meningkatkan pengetahuan agama, f) memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah, dan g) menggunakan sarana transportasi. Kalau keluarga sudah bisa memenuhi indikator tersebut, maka termasuk dalam

yang berharga dalam perjalanan ini tanpa pernah tahu apakah kita benar-benar memperoleh apa yang kita inginkan. Hidup ini merupakan sebuah perjalanan panjang, sementara Derrida (w. 2004 M) mengajarkan pada kita bahwa hidup adalah petualangan tanpa akhir dan menuju kebenaran.

Peneliti melihat bahwa penempatan zakat pada domain ibadah memperlihatkan kesenjangan antara teks dengan zakat sebagai bagian dari konsep ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak. Zakat tidak dapat dipahami sebagai semata-mata hubungan privat antara seorang hamba dan Tuhannya, yang merupakan salah satu ciri ibadah. Kesenjangan ini dapat dilihat dari ajaran zakat sebagai sesuatu yang rasional, dicanangkan untuk kemasahatan umum, dilaksanakan dengan melibatkan orang lain, manfaatnya bersifat konkret (*maḥsūs*), dan harus dikelola oleh negara. Beberapa ciri ini sangat bertolak belakang dengan ciri-ciri ibadah dalam arti perwujudan hubungan privat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Untuk memposisikan fikih zakat pada domain muamalah dengan teori rekonstruksi terlebih dahulu harus dilakukan pemisahan dan perombakan fikih zakat dari konstruksinya sebagai bagian dari rumpun ibadah (proses ini yang disebut dekonstruksi). Setelah dilakukan pemisahan dan perombakan, kemudian peneliti merakit kembali konstruksi fikih zakat dengan memasukkannya ke dalam domain muamalah.

5. Fikih Zakat sebagai Domain Muamalah

Para ulama berbeda pendapat mengenai status zakat. Menurut

dijalankan negara bertujuan demi terciptanya kesatuan sistem dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, atau dapat disederhanakan dengan kata kunci integrasi dan akuntabilitas, Sebagaimana tata kelola zakat yang telah dibangun oleh ‘Umar bin al-Khaṭṭāb (w. 644 M).

Dalam tataran praktis kewajiban zakat membutuhkan legalitas dari negara. Legalitas ini dikembangkan dari kata *al-‘āmilīn* sebagai badan atau perseorangan yang diangkat oleh negara (*man naṣābahu al-imām*), sehingga memiliki kekuatan yang mengikat. Sampai saat ini sudah ada beberapa negara yang membuat regulasi tentang zakat sesuai porsi dan kewenangannya, seperti Malaysia dan Sudan. Di Indonesia sendiri telah terbit UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai revisi terhadap UU Nomor 38 Tahun 1999. Secara umum, jika ditinjau dari sistem zakat yang dikembangkan, termasuk keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat, maka negara-negara Islam dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni negara-negara yang telah memformalisasi pengelolaan zakat dan negara-negara yang belum memformalisasinya.

Formalisasi ini tidak hanya memiliki peran simbolik saja, namun negara dibutuhkan hadir sebagai institusi yang memiliki kekuatan dan tanggung jawab untuk menciptakan rasa keadilan, khususnya di bidang ekonomi. Zakat yang berperan dan dijadikan alat oleh Allah swt. dalam menciptakan keadilan tersebut membutuhkan kehadiran negara yang

Kementerian Agama. Sedangkan contoh yang kedua adalah Indonesia, di mana pengelolaan zakat ditangani oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), sebuah lembaga semi-pemerintah yang keberadaannya diatur UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian direvisi oleh UU Nomor 23 Tahun 2011.

Atas dasar tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa:

- a. Muamalah dalam zakat bukan hanya terjadi antar personal warga negara, akan tetapi sudah terjadi muamalah antara negara dengan warganya. Oleh karena itu, negara hadir dengan seperangkat aturan dalam rangka menciptakan pengelolaan zakat yang lebih efektif sehingga sesuai dengan konsep dasar kewajiban zakat. Negara dinilai sebagai kekuatan yang memiliki hak memaksa terhadap para muzaki yang membangkang tidak membayar zakat. Juga, negara berkewajiban mendistribusikan zakat secara merata dan berkeadilan.
- b. Zakat adalah bagian dari sumber pendapatan negara. Sebagaimana yang telah dirintis sejak masa Rasulullah saw. yang dilanjutkan pada masa *al-khulafā' al-rāshidūn* yang mana zakat sebagai sumber utama pendapatan negara. Karena zakat sudah ditentukan ke mana harus didistribusikan, maka dengan pendapatan zakat pemerintah bisa membuat perencanaan strategis untuk menggunakan dana zakat dalam mengurangi kesenjangan ekonomi yang saat ini menjadi problem tersendiri di setiap negara, termasuk di Indonesia.

Apabila zakat dipahami sebagai muamalah dan posisinya masuk

bagian dari pengelolaan keuangan negara, maka semestinya pengelolaan zakat tidak melekat di Kementerian Agama. Secara garis besar, peneliti dapat mengatakan bahwa zakat seharusnya dikelola oleh Kementerian Keuangan dan penyalurannya melalui Kementerian Sosial dan beberapa kementerian lain yang *concern* terhadap penanganan dan penanggulangan kemiskinan, termasuk gerakan tanggap darurat terhadap bencana alam.

2. Faktor Historis

Kewajiban zakat sebenarnya telah ada pada saat periode Makkah tanpa adanya institusi, lantas kemudian zakat diwajibkan secara institusional setelah terbentuknya Negara Madinah (tahun 662 M atau tahun kedua hijrah). Pilihan waktu ini bukan berangkat dari ruang kosong. Zakat sebagai pungutan harta dari rakyat yang berkecukupan harus dilakukan oleh negara (sebagaimana pesan QS. al-Taubah [9] ayat 102-103), untuk kemudian ditasarufkan kepada mereka yang berhak menerimanya (sebagaimana pesan QS. al-Taubah [9] ayat 60). Hal ini memberi pemahaman bahwa negara memang harus terlibat dalam proses pemungutan dan pendistribusian zakat, dan lagi zakat masuk pada ranah publik karena harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Terkait dengan peran negara ini Rasulullah saw. yang juga sebagai kepala negara melakukan langkah-langkah taktis-praktis dalam mengampanyekan kewajiban zakat, dalam menentukan kadar harta yang harus dikeluarkan zakatnya, jenis-jenis harta kekayaan yang masuk jenis harta zakat, dan persentase yang harus ditunaikan. Kekuatan beliau benar-benar superbodi,

dapat ditentukan oleh khalifah. Pada umumnya, hasil pemungutan pajak ditujukan untuk pembangunan negara. Karena itulah, para pejabat *bayt al-māl* tidak mempunyai wewenang dalam membuat suatu keputusan terhadap harta *bayt al-māl* yang berupa zakat.

Pada masa ‘Uthmān bin ‘Affān ra. (w. 656 M), meskipun kekayaan negara Islam mulai melimpah dan jumlah zakat juga lebih dari mencukupi kebutuhan para mustahik, namun administrasi zakat justru mengalami kemunduran. Hal ini dikarenakan oleh kelimpahan tersebut yang membuat Sayidina ‘Uthmān (w. 656 M) memberi kebebasan kepada amil zakat dan individu untuk mendistribusikan zakat kepada siapa pun yang dinilai layak menerima zakat. Keputusan ‘Uthmān (w. 656 M) ini juga dilatarbelakangi oleh keinginannya untuk meminimalkan biaya pengelolaan zakat di mana beliau menilai bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dana zakat tersebut akan tinggi dikarenakan sifatnya yang tidak mudah diketahui oleh aparat negara. Namun, mekanisme seperti ini ternyata memicu beberapa permasalahan mengenai transparansi distribusi zakat, di mana para amil zakat justru membagikan zakat tersebut kepada keluarga dan orang-orang terdekat mereka.

Seiring dengan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan berbagai konflik politis lainnya yang memecahkan kesatuan negara Islam dengan wafatnya khalifah ‘Uthmān (w. 656 M) dan naiknya Sayidina ‘Alī bin Abī Ṭālib (w. 661 M) sebagai khalifah keempat, semakin marak pula praktik pengelolaan zakat secara individual. Hal ini

kepada Allah swt. namun menafikan pada yang lain; beriman kepada Allah dan rasul-Nya tetapi tidak beriman kepada yang lainnya, maka dipastikan imannya gugur dan yang bersangkutan tidak bisa disebut mukmin. Sama halnya dengan rukun salat di mana satu saja dari beberapa rukunnya gugur maka salatnya tidak sah sekalipun rukunnya yang lain dilaksanakan secara sempurna. Dalam bahasa yang berbeda dikatakan bahwa iman kepada Allah adalah *juz' min al-īmān*, iman kepada Rasulullah saw. adalah *juz' min al-īmān*, percaya kepada kitab-kitab Allah adalah *juz' min al-īmān*, dan seterusnya. Hal ini sesuai dengan definisi rukun, yaitu: *mā yatawaqqafu 'alayh ṣiḥḥat al-shay' wa huwa juz' minhu*. Berbeda keadaannya dengan term rukun Islam yang semuanya bersifat praktis dan tidak adanya saling ketergantungan antara satu dengan lainnya. Orang yang tidak salat karena nakal bukan karena tidak meyakini terhadap kewajibannya masih tetap dikatakan muslim, demikian pula orang yang tidak puasa dan haji tidak sampai menggugurkan keislamannya. Oleh karena itu, apabila dikembalikan kepada definisi rukun itu sendiri, maka sejatinya tidak ada rukun Islam. Justru bilamana dikembalikan kepada redaksi Hadisnya yang menyatakan, *buniya al-islām 'alā khams...* dan seterusnya, yang terjemahannya bahwa Islam dibangun atas lima dasar. Zakat adalah satu di antara dasar-dasar bangunan Islam (*al-zakāh mabnan min mabāniy al-islām*), bukan *rukn min al-arkān al-islām*. Bertolak dari inilah maka sangat logis jika zakat dipisah dari ibadah yang

direpresentasikan oleh salat, lalu secara substantif diposisikan pada ranah muamalah.

- e. Dalam fikih zakat terdapat ruang ijtihad sehingga zakat menjadi lebih dinamis, berkembang, dan bahkan dapat berubah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi, sebagaimana yang berlaku dalam domain muamalah. Hal ini sangat berbeda dengan salat, puasa, dan haji yang memiliki karakter statis (jumud) dan tidak membuka ruang ijtihad sehingga petunjuk dan teknis pelaksanaannya berlaku sepanjang masa tanpa terpengaruh dengan perbedaan waktu dan tempat. Sementara itu, ruang ijtihad dalam fikih zakat terdapat di sebagian besar unsur-unsurnya. Salah satunya, aspek siapa saja yang berhak menerima harta zakat ternyata mengalami penyusutan karena faktor seleksi alam. Sebab itu, saat ini jumlah penerima zakat tidak lagi mencapai delapan golongan. Golongan budak (*fi al-riqāb*) dan orang-orang yang berperang di jalan Allah (*sabīlillāh*) keduanya saling terkait dan sama-sama sudah tidak ada; peperangan atas nama agama tidak ada dan perbudakan sudah dihapus. Fakir miskin yang dijadikan golongan yang paling berhak menerima zakat masih terjadi kontroversi tentang apakah mereka hanya khusus bagi yang bergama Islam atau tidak. Hal ini tidak lepas dari status zakat sebagai bagian dari sumber pendapatan negara di mana warga negaranya tidak hanya terbatas pada mereka yang beragama Islam. Demikian juga aspek tentang jenis harta yang wajib dizakati ternyata tidak hanya terbatas pada jenis harta yang

disebutkan dalam Hadis saja. Keumuman bahasa Al-Qur'an tidak dapat dibatasi dengan penjelasan Hadis yang menyebutkan bahwa beberapa jenis harta yang hanya mencakup gandum, kurma, anggur, kambing, sapi, unta, emas, dan perak. Adapun saat ini kecenderungannya mencakup semua jenis harta yang menjadi sumber kekayaan seseorang, sesuai dengan perkembangan ekonomi global. Perkembangan bentuk-bentuk ekonomi, seperti kepemilikan saham dalam perusahaan, pasar modal, obligasi *muqāradah*, dan lain-lain, tentu tidak dapat ditemukan secara eksplisit di dalam Hadis, kecuali dapat dipahami dari semangatnya (*beyond the text*). Pemahaman terhadap nas syariat melalui pendekatan konteksnya semacam ini termasuk bagian dari muamalah.

- f. Zakat bukanlah kewajiban yang bersifat privat atau personalitas seorang manusia hanya kepada Tuhannya, namun zakat juga bersifat publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Bahkan, zakat yang merupakan kewajiban harus ditampakkan pelaksanaannya sehingga tidak sama seperti sedekah sunah yang lebih utama untuk disembunyikan. Inilah tafsir dari QS. al-Baqarah [2] ayat 271. Karena itu, amil zakat yang diangkat secara sah oleh pemerintah sangat urgen posisinya dalam pemungutan dan pendistribusian zakat. Amil memiliki peran yang sangat penting agar di masyarakat tidak ada pungli dan penipuan yang sangat rawan dalam aktivitas publik yang terkait dengan finansial. Kekayaan zakat harus dipertanggungjawabkan

kepada publik, apalagi zakat dipandang sebagai bagian dari sumber pendapatan resmi negara. Negara dapat menghimpun harta zakat secara paksa, bahkan para pembangkang zakat boleh diperangi.

- g. Sifat dan karakter zakat berbeda dengan salat, haji, dan puasa. Dampak zakat bersifat *mahsūrah* (konkret) dan dirasakan secara fisik dalam kehidupan profan. Hal ini berbeda dengan dampak ibadah salat, puasa, dan haji yang berdampak secara abstrak dan transendental. Anak kecil yang memiliki kekayaan sampai satu nisab, menurut selain mazhab Hanafi, wajib membayar zakat yang eksekusinya dilaksanakan oleh walinya, sementara ia tidak wajib melaksanakan salat, puasa, dan haji.
- h. Zakat pada prinsipnya sebagai cara Allah swt. untuk memberi sesuatu secara cuma-cuma kepada fakir miskin melalui harta yang Allah anugerahkan kepada orang-orang kaya. Cara ini sebagai konsekuensi dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial dan memiliki hikmah terciptanya solidaritas di antara mereka sehingga harta zakat diposisikan sebagai *malullāh* (harta Allah). Secara teologis, tidak ada kesulitan sebenarnya bagi Allah untuk memberi langsung kekayaan kepada mereka kaum yang tak berdaya. Karena itu, zakat disyariatkan sebagai ketentuan yang mewajibkan manusia hidup secara sosial (muamalah). Ajaran zakat ini lalu melahirkan beberapa bentuk solidaritas yang lain, seperti sedekah, wakaf, hibah, dan wasiat. Berangkat dari sinilah lalu muncul ketentuan bahwa orang yang tidak bayar zakat punya hutang kepada Allah.

- i. Tidak bayar zakat dipandang memiliki hutang kepada Allah akan tetapi instrumennya tidak mungkin bayar sama Allah, dalam zakat juga mengandung *haq al-ādamiy* sehingga untuk membayarnya harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Apabila orang yang wajib zakat meninggal sebelum membayar zakatnya, maka ia dikatakan orang yang punya hutang kepada Allah (sebab zakat diwajibkan langsung oleh *Shāri'*). Dengan demikian, maka dalam zakat terdapat kemaslahatan yang berguna untuk orang lain. Hal ini sangat berbeda dengan orang yang punya hutang salat yang tidak wajib dibayar atau diqadha manakala ia meninggal dunia; berbeda pula dengan haji yang wajib diqadha dan dilaksanakan oleh orang lain dan manfaatnya kembali pada dirinya sendiri. Atas dasar inilah zakat mirip atau sama dengan hutang piutang yang diakibatkan oleh transaksi jual beli, sewa, dan lainnya. Apabila orang yang punya piutang mencuri harta debiturnya, maka yang bersangkutan tidak dipotong tangan karena terdapat *shubhat al-milk*, hal ini juga berlaku bagi fakir miskin yang mencuri harta orang-orang yang tidak bayar zakat, hukum potong tangan tidak diberlakukan karena ada *shubhat al-milk*.
- j. Keibadahan zakat tidak berarti hilang karena diposisikan pada muamalah. Dalam muamalah sendiri juga mengandung nilai-nilai ibadah; dalam jual beli terdapat istilah *bay' mabrūr* yang notabene berkonotasi *al-madh* (pujian) dari *Shāri'* dan berkonsekuensi meraih pahala; juga ada istilah *al-tājir al-ṣaḍūq* yang akan dikumpulkan di

yakni dalam rangka memberi perlindungan bagi yang lemah dan mengendalikan yang kuat. Manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki berbagai potensi kejiwaan, terkadang ia hampir sama dengan malaikat dan terkadang ia menyerupai tingkah laku setan sehingga ia berperilaku bejat serupa binatang. Salah satu yang biasa terjadi dalam suatu komunitas binatang adalah adanya dominasi yang kuat atas yang lemah. Kehidupan sosial dari komunitas manusia juga terkadang mengalami hal yang sama di mana yang kuat sering memakan (menindas) yang lemah. Mereka yang kaya cenderung mendiskreditkan mereka yang lemah, sehingga diperlukan adanya wasit yang mampu menjaga keseimbangan antara dua kelompok manusia yang tidak seimbang ini. Ajaran zakat sebagai bentuk teladan yang sangat ideal bagi para pemimpin, di mana Allah swt. sangat berpihak kepada yang lemah. Hal ini hendaknya menjadi teladan para pemimpin dalam menjalankan tugas-tugasnya, terutama dalam menciptakan keadilan sosial yang sebenarnya. Betapa banyak orang-orang kaya terjerumus pada sikap arogansi karena kekayaannya. Di sinilah ajaran zakat sangat berperan sebagai pintu masuk untuk memaksa yang kaya agar memiliki sikap solidaritas terhadap yang lemah secara ekonomi, atau dengan bahasa agama *kay lā yakūna dūlah bayn al-aghniyā' minkum*. Zakat memiliki ruh penciptaan kesejahteraan sosial yang notabene bergerak di ruang publik, bukan di ranah privat. Pemaksaan langsung dari Allah swt. tidak hanya

yang harus dikeluarkan zakatnya, berbeda dengan siapa saja yang berhak menerima zakat (*mustahiq al-zakāh*) yang disampaikan secara rinci sebagaimana terdapat dalam QS. al-Taubah [9] ayat 60. Hal ini dapat dipahami bawa pendistribusian kekayaan negara, termasuk kerentanan zakat dengan kecurangan dan tindakan korup. Berdasarkan rincian tersebut maka semua orang bisa mengetahui dan bisa melakukan kontrol sosial apabila terjadi penyelewengan. Tidak adanya nas yang rinci dalam mengurai harta yang menjadi objek zakat tersebut menunjukkan bahwa kekayaan yang menjadi sumber ekonomi setiap orang atau setiap komunitas dalam lintas negara tidaklah sama. Dalam konteks muamalah setiap orang bebas bekerja untuk mencari kekayaan dari mana pun sumber dan bentuk pekerjaannya. Rambu-rambu yang digariskan tidak lebih dari ketentuan dan prinsip-prinsip umum, seperti tidak mengandung unsur manipulasi (*gharar*), tidak adanya unsur riba (*'adam al-ribā*), adanya sukarela (*al-tarāḍī*), tidak mengandung bahaya (*'adam al-ḍarar*), dan adanya manfaat (*wujūd al-manfa'ah*). Dalam konteks pertanian banyak sekali jenis tanaman yang bisa menjadi sumber ekonomi seseorang, tidak hanya terbatas pada kurma, anggur, dan gandum saja. Di Indonesia, misalnya, ada beras, jagung, dan di sebagian tempat ada pula sagu. Jikapun dibatasi pada jenis tanaman yang masuk kategori *al-iqtiyāh* (makanan pokok). Dalam tambang, misalnya, tidak hanya terbatas pada emas dan perak, yang keduanya dijadikan mata uang dinar dan dirham. Di beberapa negara ada pula

keumuman Al-Qur'an, membatasi kemutlakannya, dan bukan pula memperjelas ke-*mujmal*-annya. Oleh karena itu, dalam kasus beras dan jagung, misalnya, tidak perlu dianalogikan dengan gandum ataupun kurma. Sebab, dua jenis tanaman tersebut termasuk dalam keumuman ayat, *wa mimma akhrajna lakum min al-ard* (apa pun yang Kami tumbuhkan dari bumi). Berangkat dari inilah maka peneliti memandang perlu untuk menambah satu kategori tersebut dalam hubungan Al-Qur'an dengan As-Sunnah. Berangkat dari pemikiran di atas pula maka hampir di semua jenis objek zakat dapat dikembangkan sesuai prinsip keadilan yang proporsional berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat di beberapa negara dan komunitas yang berbeda. Selama ini setiap ada upaya pengembangan zakat selalu dilarikan kepada *tijarah* (perdagangan), misalnya kopi, coklat, semangka, madu, dan lain-lain, yang selalu dianggap sebagai perdagangan. Padahal, secara praktis dari proses sampai panen tidak berbeda dengan *zurū'*. Hal ini terjadi karena kuatnya *'illat al-iqtiyāh* yang dicetuskan oleh Imam al-Shāfi'ī (w. 820 M) terhadap zakat tanaman. Agar masing-masing jenis harta tersebut tetap pada posisinya dirasa perlu menjadikan *'illat al-manfa'ah* sebagai dasar kewajiban zakat *zurū'* sebagaimana dicetuskan oleh mazhab Imam Abū Ḥanīfah (w. 767 M). Dari hasil penelusuran peneliti, tidak ada kata sepakat dari para ulama' tentang harta yang menjadi objek zakat. Sebagian di antara mereka ada yang membatasi pada jenis-jenis harta yang disebutkan dalam Hadits,

kebalikan dari miskin atau fakir. Pengertian kaya atau miskin adalah relatif dan tidak ditentukan kekayaannya harus dari sumber penghasilan tertentu. Oleh karena itu, dalam konteks zakat telah ditentukan melalui nisab sebagaimana dijelaskan dalam Hadis tentang zakat. Ada orang yang tidak memiliki kekayaan padi atau jagung akan tetapi ia memiliki kekayaan dari tebu, coklat, kopi, dan barang-barang komoditi lainnya. Ada orang yang tidak memiliki kekayaan berupa barang tetapi ia memiliki kekayaan berupa uang dan surat-surat berharga. Ada orang yang tidak memiliki emas dan perak namun ia memiliki sejumlah lahan batu bara. Ada orang yang tidak memiliki kekayaan sejumlah ternak berupa sapi, kambing, dan unta, tetapi ia memiliki ribuan ekor ayam dan tambak udang yang nilainya lebih dari nilai nisab sapi, kambing, dan unta. Ada orang yang tidak memiliki sumber penghasilan dari pertanian, peternakan, perdagangan, ataupun emas dan perak, tetapi ia memiliki kekayaan dari gaji profesinya sebagai pejabat, dokter, konsultan, pengacara, dan beberapa profesi yang lainnya. Apabila *'illat* wajibnya zakat adalah “status kaya”, maka beberapa jenis sumber ekonomi tersebut semuanya wajib zakat jika sudah mencapai status atau sifat kaya. Peneliti melihat bahwa tanah yang tidak produktif pun saat ini wajib zakat, karena dengan diamnya saja tanah tersebut telah memiliki sifat berkembang (*al-namā'*) dan menjadi sumber kekayaan.

- e. Pemberian *'illat al-iqtiyāt* terhadap jenis tanaman yang wajib zakat

yang mudah mendapatkan dan tidak membutuhkan tenaga manusia maka zakatnya lebih besar, seperti zakat harta *rikāz* sebesar 5% dan hasil pertanian tadah hujan mencapai 10%. (3) Kondisi sosial ekonomi masyarakat kala itu yang masih sangat tradisional dan sangat natural. Perbedaan jumlah nisab binatang ternak antara unta, sapi, dan kambing tak terlepas dari perbedaan harga binatang tersebut.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka jika saat ini jenis binatang ternak sapi saja terdiri dari beberapa macam yang membedakan harga antara satu dengan yang lain, maka nisabnya juga akan mengalami perubahan. Contoh, satu ekor sapi limosin dengan harga Rp 30.000.000,- sebanding dengan dua ekor sapi lokal yang harga per ekor tidak lebih dari Rp 15.000.000,-. Dengan demikian, maka jumlah sapi limosin sebanyak 15 ekor akan sebanding dengan 30 ekor sapi lokal, dengan kata lain, nisab sapi limosin sebanyak 15 ekor yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sebab, secara nilai sebanding dengan 30 ekor sapi lokal yang merupakan nisabnya sesuai dengan ketentuan eksplisit di dalam Hadis. Pemikiran ini pun terinspirasi atas perbedaan yang berlaku antara unta yang jumlah nisab minimumnya sejumlah 5 ekor saja telah tergolong wajib zakat sedangkan untuk sapi minimum berjumlah 30 ekor.

Hal ini juga terjadi pada binatang ternak kambing. Misalnya, antara kambing biasa dan kambing etawa. Seekor kambing etawa,

misalnya, mencapai harga Rp 15.000.000,-, sementara kambing kacang hanya sejuta. Jika 40 ekor kambing kacang baru mencapai 1 nisab, maka secara nilai sama dengan 8 ekor kambing etawa. Jika ketentuan zakat itu didasarkan pada kuantitas dengan jalan menghitung kuantitasnya dan mengabaikan nilai atau kualitasnya, maka akan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi yang merupakan bagian dari *maqāsid al-sharī'ah al-mu'tabarah*, pun juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam perspektif bernegara. Hal di atas dapat teratasi apabila dikembalikan kepada *al-ghinā* (kriteria kaya) sebagai *'illat* wajibnya zakat di mana indikator pencapaian ketentuan nisabnya sesuai dengan yang dijelaskan di dalam Hadis. Pemikiran ini secara konsep dapat diterima apabila fikih zakat diposisikan pada domain muamalah yang bercirikan rasional, fleksibel, dan dinamis.

Pertimbangan tersebut juga berpengaruh pada ketentuan jumlah persentase zakat yang harus dikeluarkan. Jika persentase zakat yang ditentukan dalam Hadis didasarkan pada pertimbangan sosiologis dan ditetapkan oleh Nabi Muḥammad sebagai kepala negara, maka bisa saja ditambah sesuai dengan kondisi suatu negara. Seorang kepala negara bisa membuat keputusan melalui Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Perdagangan, bahwa berdasarkan kajian sosial dalam menanggulangi kebutuhan fakir dan miskin, bisa saja persentase zakat ditetapkan dengan lebih besar sesuai kebutuhan. Jika misalnya zakat perdagangan atau penghasilan ditetapkan menjadi 10%, maka

kaya itu mengeluarkan hartanya untuk membantu mereka orang-orang yang sangat membutuhkan tersebut. Jika demikian adanya sungguh hal ini sangat naif dan tidak logis manakala mereka yang kaya enggan mengulurkan bantuannya sebab belum ada dalil yang menganjurkan atau mewajibkannya. Karena itu, diperlukan penerapan tingkatan paradigma yang lebih tinggi, yakni asas kemanusiaan (humanitarianisme), sehingga dapat dikatakan bahwa membantu mereka yang lemah secara kemanusiaan bukan sekadar sebetuk anjuran tetapi merupakan kewajiban kendati belum ada dalil syariat yang eksplisit mewajibkannya. Hemat peneliti bahwa prinsip kemanusiaan inilah yang dalam beberapa bahasan fikih dijadikan sebagai salah satu faktor yang dapat menggugurkan hukum fikih normatif dalam konteks pergaulan antar sesama manusia. Ilustrasi lain, tentang kewajiban membayar hutang kepada orang lain dan kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya adalah ketentuan hukum fikih yang menjadi standar acuan dalam pemenuhan hak antar sesama manusia atau dalam hubungan tertentu yang lebih eksklusif. Namun, ketentuan hukum wajib membayar hutang dan menafkahi istri itu akan menjadi gugur manakala atas dasar kemanusiaan si empunya piutang (kreditur) membebaskan piutangnya dan begitu pula sang istri yang tidak mau menerima nafkah dari suaminya lantaran kondisi ekonomi suaminya kurang berdaya sementara di sisi lain istrinya kaya.



Belanja Negara (APBN) dan digunakan secara sungguh-sungguh untuk mengatasi kesenjangan sosial sesuai peruntukannya yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Apabila perolehan harta zakat mengalami surplus, pemerintah dapat memanfaatkannya untuk *cost* pembangunan atau pembenahan infrastruktur publik yang menjadi sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, semisal pendidikan dan kesehatan.

- b. Melakukan reformulasi pengelolaan zakat di bawah Kemenkeu dan pentasarufannya dilaksanakan oleh kementerian yang programnya bersentuhan dengan para mustahik.
3. Kepada ormas-ormas keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul 'Ulama (NU), Muhammadiyah, dan beberapa perguruan tinggi yang memiliki konsentrasi studi Islam, hendaknya melakukan kajian tentang kemungkinan lahirnya sebuah istilah yang bisa diterima oleh semua pihak sebagai penjelmaan dari bahasa zakat sehingga resistensi sosial yang bermuatan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan) dapat dihindari dan berpeluang menjadi salah satu faktor penghambat totalitas pengelolaan zakat oleh negara.

